

ORIENTASI POLITIK DAN PERILAKU MEMILIH PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019

Oleh : Zulfiki Patra

Dosen Pembimbing : Dr. Hasanuddin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293-

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

In the 2019 presidential and vice presidential elections, the participation of voters with disabilities in Pekanbaru City was very low. So it is very interesting to know the conditions of political orientation and voting behavior for people with disabilities in the 2019 presidential and vice presidential elections. This study aims to determine the political orientation and voting behavior of persons with disabilities in the 2019 presidential election.

This study uses three approaches to political orientation, namely cognitive orientation, affective orientation and evaluative orientation. Choosing behavior also has three kinds of approaches, namely the sociological approach, the psychological approach and the rational choice approach. This research is structured based on qualitative research methods with data collection techniques in the form of interviews and documentation with informants who have been determined by the researcher.

The results of this study indicate that the political orientation of persons with disabilities has three approaches. First, the cognitive orientation of persons with disabilities in general elections is good. Second, affective orientation, namely that elections are very important. Voters tend to say that the performance of the election administration at that time was ineffective, which resulted in voters being unable to exercise their voting rights. Third, the evaluative orientation, namely voters assessing the implementation of the 2019 presidential election did not run smoothly, there were still many frauds. Voters also think that a candidate deserves to be chosen because of their good track record and achievements that have been achieved by the candidate. Furthermore, the behavior of choosing persons with disabilities has three approaches. First, the sociological approach of persons with disabilities is influenced by organizations of persons with disabilities, the candidate's performance and religion. Second, the psychological approach of persons with disabilities is influenced by party identification, the issue of foreign workers, and candidate figures who have charismatic characteristics and the candidate's personality. Third, the rational approach of persons with disabilities is influenced by the vision and mission and programs, rationality sensitivity, one's wealth, achievements and debt issues. The tendency of choosing behavior is more influenced by disability organizations. Meanwhile, voters who do not use their voting rights generally do not receive ballots.

Keywords: *Political Orientation, Voting Behavior, Persons with Disabilities*

Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut paham demokrasi tentunya pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan sistem demokrasi. Pemilu langsung oleh rakyat merupakan pelaksanaan dan perwujudan dari kedaulatan rakyat agar menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945). Perwujudan kedaulatan rakyat ini dengan pelaksanaan pemilu secara langsung untuk memilih wakil-wakil rakyat sebagai penyalur dari aspirasi rakyat itu sendiri.

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih presiden dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu Pilpres tahun 2019. Pilpres Tahun 2019 diikuti 2 pasangan calon presiden, pasangan pertama yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC). KH. Ma'ruf Amin yang di usung oleh partai PKPI, Hanura, PPP, Nasdem, Golkar, PKB, PDIP. Pasangan kedua yaitu H. Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, MBA yang di usung oleh partai Demokrat, PAN, PKS, Gerindra.

Orang yang berkebutuhan khusus (disabilitas) juga memiliki hak yang sama dengan manusia yang umumnya, secara fisik dan mental itu normal. Penyandang

disabilitas atau difabel adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini.

Untuk melindungi dan mengakui hak politik penyandang disabilitas maka dilakukanlah sosialisasi kepada penyandang disabilitas pada saat pelaksanaan pemilu. KPU Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi pemilu 2019 kepada penyandang disabilitas selama 4 bulan di tempat yang berbeda berupa tata cara memilih, memastikan mereka sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), pengenalan jenis suara, serta memperkenalkan pasangan calon kepada penyandang disabilitas. Dengan adanya sosialisasi tersebut maka penyandang disabilitas diharapkan memiliki pengetahuan tentang tata cara untuk memilih, terdaftar di DPT, mengetahui berbagai jenis suara dan juga kenal dengan pasangan calon.

Demokrasi ditandai oleh adanya tiga prasyarat; (1) kompetisi di dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, (2) partisipasi masyarakat dan (3) adanya jaminan hak-hak sipil dan politik. Dalam hal ini, sistem pemilu (*electoral System*) merupakan salah satu instrumen kelembagaan penting di dalam negara demokrasi untuk mewujudkan tiga prasyarat demikian.

Salah satu indikator matangnya demokrasi suatu bangsa adalah tingginya tingkat partisipasi politik masyarakatnya. Dalam konteks ini, partisipasi yang diinginkan adalah proses transformasi kepentingan publik dalam ranah struktur politik, dipilih dan memilih sesungguhnya merupakan posisi yang sama, yakni berpartisipasi dalam dunia politik. Ketika masyarakat aktif dalam dunia/ranah politik, mereka mengatakan bahwa inilah

bagian partisipasi dalam sistem politik. Namun pada umumnya, partisipasi politik masih di maknai pendek oleh masyarakat, yakni partisipasi atau keikutsertaan warga negara dalam kegiatan hak memilih baik itu mencoblos atau mencontreng di tempat pemungutan suara (TPS) waktu pemilihan.

Tabel 1.1

Data Pemilih Disabilitas Provinsi Riau

No	Kabupaten/ Kota	DPT	Yang mengguna kan surat suara	Persent asi%
1	Kepulauan Meranti	188	147	78,19%
2	Kampar	428	205	47,89%
3	Indragiri Hulu	289	211	73,01%
4	Bengkalis	287	252	87,80%
5	Indragiri Hilir	675	147	21,77%
6	Pelalawan	276	99	35,86%
7	Rokan Hulu	287	241	83,97%
8	Rokan Hilir	236	141	59,74%
9	Siak	661	256	38,72%
10	Kuantan Singingi	236	190	80,50%
11	Kota Pekanbaru	1631	552	33,84%
12	Kota Dumai	222	135	60,81%
Jumlah		5.416	2.576	47,56%

Sumber: Data Olahan Penulis kpu.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 diatas bahwa jumlah penyandang disabilitas Provinsi Riau berjumlah 5.416 namun yang menggunakan hak suaranya hanya 2.576 atau 47,56%. Jumlah penyandang disabilitas Provinsi Riau dalam menggunakan hak suaranya sangat rendah jumlah tersebut belum mencapai standar partisipasi yaitu 77,5%. Terlihat juga pada tabel tersebut bahwa kabupaten Indragiri Hilir merupakan yang paling terendah dalam menggunakan hak suaranya yaitu hanya 147 suara atau 21,77%. Kota Pekanbaru menduduki posisi ke dua

terendah setelah Indragiri Hilir yaitu 552 suara atau 33,84% padahal Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan luas wilayahnya paling kecil di bandingkan Kabupaten/Kota lainnya selain menjadi pusat ibu kota, Kota Pekanbaru juga sebagai cerminan bagi Kabupaten/Kota lainnya serta memiliki aksesibilitas yang beraneka ragam. Penyandang disabilitas Kota Pekanbaru merupakan penyandang disabilitas dengan jumlah paling banyak di Provinsi Riau, namun dalam partisipasinya penyandang disabilitas masih rendah.

Tabel 1.2

**Data Pemilih Penyandang Disabilitas
Kota Pekanbaru**

No	Uraian		Kota Pekanba ru	Persent ase %
1	Jumlah seluruh pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK berdasarkan jenis kelamin	L K	792	48,56 %
		P R	839	51,44%
		J M L	1631	100%
2	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berdasarkan jenis kelamin	L K	261	47,28%
		P R	291	52,72%
		J M L	552	100%
3	Jumlah seluruh pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK		1631	33,84%
	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		552	

Sumber: Data Olahan Penulis kpu.go.id

Berdasarkan tabel 1.2 di atas bahwa jumlah penyandang disabilitas Kota

Pekanbaru berjumlah 1631, ini merupakan jumlah terbanyak para penyandang disabilitas yang terdaftar di DPT dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Namun, dalam menggunakan hak pilih sangat rendah yaitu berjumlah 552 atau hanya 33,84% dari total keseluruhan DPT, DPTb dan DPK penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas Kota Pekanbaru menduduki peringkat kedua terendah setelah kabupaten Indragiri Hilir dalam penggunaan hak suara pada Pilpres 2019.

Adapun dorongan mengenai cara menggunakan hak pilih. Pertama, motivasi yang diartikan usaha yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kedua, tindakan diartikan sebagai hal yang dilakukan untuk mengatasi sesuatu. Ketiga, sikap diartikan sebagai cara dalam merespon perbuatan, perilaku, pandangan dan pendapat. Hal ini pula yang terjadi pada pemilih penyandang disabilitas Kota Pekanbaru, dimana penyandang disabilitas dalam menentukan pilihannya cenderung di pengaruhi oleh organisasi, visi-misi, serta isu-isu yang berkembang.

Pada pilpres tahun 2019 tingkat partisipasi penyandang disabilitas merupakan yang paling terendah dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Berdasarkan masalah tersebut peneliti ingin menelaah lebih jauh tentang bagaimana pandangan yang mendasari pikiran, perhatian atau kecenderungan dalam menentukan sikap dengan tepat dan benar dari pemilih penyandang disabilitas dan pembuatan keputusan dalam pilpres tahun 2019, Penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Orientasi Politik dan Perilaku Memilih Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana Orientasi Politik dan Perilaku Memilih Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019?”

Kerangka Teori

1. Orientasi Politik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), orientasi adalah pandangan yang mendasari pikiran, perhatian atau kecenderungan dalam menentukan sikap (arah, tempat dan sebagainya) dengan tepat dan benar. Jadi orientasi adalah cara pandang yang didasari oleh pikiran, perhatian serta kecenderungan yang kemudian menghasilkan sebuah sikap dan perilaku.

Seorang individu atau kelompok dalam pemberian suara ketika Pemilu legislatif memiliki orientasi untuk menentukan pilihannya. Menurut Almond dan Verba, dengan lebih komprehensif mengacu pada apa yang dirumuskan Parsons dan Shils tentang klasifikasi tipe-tipe orientasi, yang mana orientasi itu mengacu pada aspek-aspek objek yang dibakukan dalam sistem politik, yaitu:

- a. **Orientasi Kognitif**, yaitu pengetahuan, kesadaran dan kepercayaan terhadap sistem politik, atau berkenaan dengan apa-apa yang dipercayai oleh warga negara yang berkaitan erat dengan apa yang terjadi dalam dunia politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya. Orientasi kognitif mengenai penelitian ini antara lain adalah pengetahuan pemilih penyandang disabilitas tentang pemilu, penyelenggaraan pemilu dan calon Presiden.
- b. **Orientasi Afektif**, yaitu yang berisi perasaan-perasaan dan emosi-emosi terhadap objek politik. Hal ini menyangkut pada masalah ikatan

emosional yang dimiliki oleh individu terhadap objek politik, yaitu berupa persamaan suku, ras, jenis kelamin, agama, persamaan dalam pilihan politik (partai) dan lain sebagainya yang meliputi perasaan atau ikatan emosional. Isinya bisa mengenai peranan-peranan yang dilakukan oleh struktur politiknya, para aktor (prilaku politik) dan apa yang dilakukan dalam penampilan mereka dalam praktek politik. Orientasi afektif mengenai penelitian ini adalah perasaan dan sikap pemilih penyandang disabilitas terhadap pemilu, penyelenggaraan pemilu dan calon Presiden.

- c. **Orientasi Evaluatif**, yaitu keputusan dan pendapat tentang objek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Atau dalam pengertian yang lain, tipe orientasi politik semacam ini merupakan tingkatan yang tertinggi dalam kualitas orientasi politik. Didalamnya sudah terdapat dan berisikan pemahaman yang lebih tinggi tentang sistem politik. Seseorang atau kelompok yang memiliki orientasi politik evaluatif, sudah mampu membuat keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik, yang didasarkan kepada kombinasi standar nilai dan kriteria yang didasarkan kepada informasi yang diperoleh dan perasaan tentang hal-hal tersebut. Orientasi evaluatif mengenai penelitian ini adalah kriteria pemilih penyandang disabilitas terhadap calon Presiden, penilaian terhadap pemilu dan penyelenggaraannya serta keputusan dalam memilih calon Presiden.

2. Perilaku Memilih

Perilaku memilih adalah keikutsertaan warga dalam pemilu sebagai rangkaian pembuatan keputusan. Untuk memahami kecenderungan perilaku memilih, mayoritas masyarakat saat ini secara akurat kita bias mengombinasikan dua pendekatan yang relevan. Pertama, pendekatan psikologi sosial. Konsep ini

merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai. Kedua, pendekatan rasional. Dalam pendekatan ini, kegiatan memilih dipandang sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Pertimbangan untung dan rugi terutama digunakan untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak.

Dalam studi perilaku memilih, ada beberapa pertanyaan pokok dalam studi perilaku memilih, *pertama*, berkaitan dengan partisipasi dalam pemilu atau pemilihan presiden. *Kedua*, berkaitan dengan warga terhadap partai politik atau calon anggota DPR/DPRD, DPD, atau calon presiden.

Dalam menjelaskan pendekatan perilaku memilih terdapat tiga klasifikasi pendekatan yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah yang terawal muncul dalam tradisi studi perilaku memilih. Model ini dikembangkan di Eropa dan di Amerika pada tahun 1950-an dan dibangun dengan asumsi bahwa perilaku memilih ditentukan oleh karakteristik sosiologis para pemilih, terutama kelas sosial, agama dan kelompok etnik/kedaerahan. Pendekatan sosiologis untuk *voter turnout* telah dikembangkan secara canggih dengan apa yang disebut sebagai model SES (*socio economic status*), lalu disempurnakan dalam apa yang disebut sebagai *Civic Voluntary Model*. Inti dua model ini bahwa seorang berpartisipasi dalam pemilu karena kesadaran tentang arti penting pemilu bagi kepentingan dirinya dan masyarakat banyak. Hasil pemilu akan menentukan kebijakan-kebijakan publik yang akan berkaitan dengan semua warga negara, termasuk dirinya.

b. Pendekatan Psikologis

Muncul kritik terhadap pendekatan psikologis baik yang berkaitan dengan masalah *voter*

turnout maupun pilihan politik. Dalam hubungannya dengan *voter turnout*, pemilih yang mempunyai daya sosial-ekonomi lebih baik dan berada dalam jaringan sosial yang bisa dijangkau oleh partai atau elite politik, belum tentu berpartisipasi dalam pemilu atau pilpres bila ia tidak tertarik atau tidak mempunyai ikatan psikologis dengan partai atau tokoh partai tertentu. Karena itu pendekatan sosiologis jelas tidak cukup untuk menjelaskan mengapa seorang warga ikut dalam pemilu atau pilpres.

Menurut pendekatan ini, seorang warga berpartisipasi dalam pemilu atau pilpres bukan saja karena kondisinya lebih baik secara sosial-ekonomi, atau karena berada dalam jaringan sosial, akan tetapi, karena ia tertarik dengan politik, punya perasaan dekat dengan partai tertentu, punya informasi cukup untuk menentukan pilihan, merasa suaranya berarti, serta percaya bahwa pilihannya dapat ikut memperbaiki keadaan.

c. Pendekatan Pilihan Rasional

Menurut perspektif rasionalitas, seorang warga berperilaku rasional. Yakni, menghitung bagaimana caranya mendapatkan hasil maksimal dengan ongkos minimal. Pendekatan pilihan rasional melihat perilaku seseorang melalui kalkulasi untung rugi yang didapatkan oleh orang tersebut.

Pendekatan pilihan rasional memberikan penjelasan sederhana: orang memilih calon atau partai apabila calon atau partai tersebut dipandang dapat membantu kepentingan dasarnya: kehidupan ekonomi. Bagaimana seorang pemilih mengetahui bahwa calon atau partai tertentu dapat membantu mencapai kepentingan ekonominya tersebut tidak membutuhkan informasi yang terlalu detail dan akurat dari seorang pemilih atas posisi calon atau partai

atas isu tersebut, juga atas kemampuan calon atau partai untuk memenuhi janji-janjinya. Cukup dengan mempersepsikan keadaan ekonomi dirinya (egosentrik) di bawah sebuah pemerintahan (partai atau calon) tertentu sekarang ini dibanding sebelumnya (retrospektif) dan evaluasi umum seorang pemilih atas keadaan ekonomi nasional (sosiotropik) di bawah pemerintahan sekarang dibanding tahun sebelumnya (retrospektif), dan keadaan ekonomi nasional di bawah pemerintahan sekarang dibanding dengan tahun-tahun yang akan datang (prospektif).

Teknik Analisis Data

Untuk memberikan pemaknaan atas data atau fenomena yang ditentukan dan dikumpulkan dalam penelitian ini maka dilakukan analisis dengan pendekatan kualitatif dengan eksplanasi bersifat deskriptif. Dipilihnya teknik analisis deskriptif kualitatif karena permasalahan atau sasaran penelitian adalah Orientasi Politik dan Perilaku Memilih Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru pada Pemilihan Presiden Tahun 2019. Langkah yang ditempuh dengan mengorganisir data berupa gambar, foto, dokumen, biografi, artikel atau buku-buku pedoman dan sebagainya. Data juga diperoleh dari internet atau surat kabar berkaitan dengan masalah penelitian. Selanjutnya dianalisis dengan model siklus interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984), mengatakan bahwa aktifitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

HASIL PENELITIAN

A. Orientasi Politik dan Perilaku Pemilih Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019

1. Orientasi Politik

Orientasi politik adalah penilaian individu yang menentukan sikap, arah dan keyakinan serta nilai-nilai terhadap identifikasi kepartaian, calon-calon presiden dan isu-isu kampanye pemilihan presiden sehingga menjatuhkan pilihannya pada calon presiden tersebut lebih didasarkan pada rasional atau perasaan.

a. Orientasi Kognitif

Orientasi kognitif merupakan pengetahuan atas mekanisme input dan output sistem politik, termasuk pengetahuan atas hak dan kewajiban selaku warganegara. Orientasi kognitif juga merupakan suatu pemahaman atau pengetahuan yang dimiliki oleh individu tentang kepercayaan pada politik dan segala kewajibannya untuk menilai tentang pemilihan umum.

Setiap penyandang disabilitas mendapatkan informasi seputar pilpres tahun 2019 melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penyandang disabilitas mengenal sosok pasangan calon, selain mengenal sosok pasangan calon melalui sosialisasi yang diberikan oleh pihak KPU maupun organisasi disabilitas, para penyandang disabilitas juga mengenal sosok pasangan calon melalui media elektronik ataupun media sosial. Tidak hanya mengenal sosok pasangan calon saja, penyandang juga mengenal partai yang turut berpartisipasi. Penyandang disabilitas juga mengetahui asas-asas pemilu, Pemilu yang berkualitas dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi proses dan sisi hasil. Apabila dilihat dari sisi proses pemilu dapat dikatakan berkualitas jika pemilu tersebut berlangsung secara demokratis, langsung, umum, bebas, jujur, adil, dan rahasia serta aman, tertib dan lancar. Sedangkan apabila pemilu dilihat dari sisi hasil, pemilu dapat dikatakan berkualitas jika pemilu tersebut dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat, dan pemimpin negara

yang mampu mewujudkan cita-cita nasional

b. Orientasi Afektif

Orientasi afektif merupakan Perasaan individu terhadap sistem politik, termasuk peran para aktor (politisi) dan lembaga-lembaga politik (partai politik, eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Orientasi afektif merupakan aspek yang paling berpengaruh merubah sikap individu, jika individu menganggap baik maka individu akan terlihat penuh. Kaitannya dengan pemilihan umum yaitu suatu perilaku politik yang mengikuti tata cara dan aturan dalam politik, salah satu bentuk dalam pemilihan umum yaitu ikut berpartisipasi memilih pada wakil rakyat. Orientasi afektif yang akan diteliti meliputi sikap penyandang disabilitas, tentang peraturan pemilu, sikap penyandang disabilitas terhadap lembaga penyelenggara.

Pada pilpres tahun 2019 penyandang disabilitas dominan memiliki kesadaran akan pentingnya penggunaan surat suara, mereka menganggap suara mereka sangat penting untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik.

Penyandang disabilitas memiliki kesadaran partisipasi yang tinggi dalam pemilu. Mereka sangat antusias ingin menyalurkan hak suara yang mereka miliki, namun ketika ingin menyalurkan hak suara pemilih mengalami beberapa kendala yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak suaranya, kendala tersebut berupa masih kurangnya surat suara, kesalahan pada pendataan daftar pemilih tetap, serta masih ditemukannya kecurangan. Kurangnya surat suara dan kesalahan pendataan mengakibatkan pemilih tidak dapat menggunakan hak suaranya, adanya data yang dimanipulasi menunjukkan lemahnya pengawasan badan penyelenggaraan pemilu.

Keterlibatan penyandang disabilitas dalam pesta demokrasi saat ini sangat dipengaruhi oleh hak-hak penyandang disabilitas yang diperjuangkan negara, supaya para penyandang disabilitas bisa menggunakan hak pilihnya. Sangat disayangkan dengan belum maksimalnya kinerja badan penyelenggaraan pemilu hak pilih penyandang disabilitas tidak bisa digunakan, sehingga penyandang disabilitas tidak dapat berpartisipasi pada pilpres tersebut.

c. Orientasi Evaluatif

Orientasi evaluatif merupakan keputusan dan pendapat individu tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai, kriteria informasi dan perasaan, misalnya tampak saat pemilu. Orientasi warga yang sifatnya evaluatif atau penilaian seperti pendapat dan penilaian warga terhadap suatu pemilu. Orientasi afektif berisikan pemahaman yang lebih tinggi tentang sistem politik. Seseorang yang memiliki orientasi politik evaluatif, sudah mampu membuat keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik, yang didasarkan pada kombinasi standar nilai dan kriteria yang didasarkan pada informasi yang didapat dan perasaan tentang hal-hal tersebut.

Penyandang disabilitas menilai berdasarkan rekam jejak yang bersih, sosok presiden ideal menurut pemilih adalah kandidat yang tidak pernah terlibat pelanggaran hukum, baik itu korupsi maupun kriminal menjadi syarat kandidat layak dipilih. Penyandang disabilitas juga menilai melalui prestasi yang telah dicapai oleh kandidat, prestasi yang telah dicapai oleh kandidat merupakan bentuk keberhasilan yang di jadikan pertimbangan oleh penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sangat antusias dalam berpartisipasi

pada pilpres 2019 tersebut, namun pada saat pencoblosan pemilih tidak bisa menyalurkan hak suaranya di karenakan pada saat penyelenggaraannya pemilih menemui kekurangan yang membuat pemilih tidak bisa mencoblos yaitu berupa kurangnya surat suara, banyaknya surat suara yang sudah tercoblos, dan adanya data yang dimanipulasi. Pilpres yang sudah berlangsung tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, seolah tidak ada jalan keluar yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Puncaknya adalah korban jiwa dari pihak pengamanan hingga KPPS yang bertugas dalam penyelenggaraan pilpres kali ini.

Secara keseluruhan, bagi pemilih menilai bahwa Pilpres 2019 gagal dalam mempersatukan bangsa indonesia sebagai bangsa yang utuh. Gagal dalam mendewasakan pemilih yang selalu berargumen mengenai identitas dibandingkan mengenal ide atau gagasan dalam membawa indonesia menuju arah yang lebih baik.

2. Perilaku Memilih

Ramlan Surbakti berpendapat bahwa perilaku pemilih merupakan aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih dan tidak memilih (*to vote or not to vote*) di dalam suatu pemilu maka voters akan memilih atau mendukung kandidat tertentu. Perilaku memilih dapat dilihat dari beberapa pendekatan yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional.

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis menentukan perilaku memilih pada para pemilih, terutama etnis, ikatan kesukuan, ikatan kekeluargaan, pendidikan, jabatan, pekerjaan dan

jenis kelamin, serta usia, agama dan sebagainya, secara umum menjadi indikator bagi sebagian pemilih masyarakat yang menentukan pilihannya dari pendekatan sosiologis. Subkultur tertentu memiliki kondisi sosial tertentu yang pada akhirnya bermuara pada perilaku tertentu.

Pendekatan ini juga berdasarkan pengelompokan sosial, baik secara formal maupun informal. Secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi-organisasi keagamaan, organisasi profesi, dan sebagainya. Dan kelompok-kelompok informal seperti keluarga, pertemuan, ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya, merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku politik seseorang, karena kelompok-kelompok inilah yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan sikap, persepsi dan orientasi seseorang.

Dalam menentukan pilihannya penyandang disabilitas dipengaruhi oleh organisasi penyandang disabilitas. Organisasi dalam hal ini sangat mempengaruhi penyandang disabilitas dalam menentukan pilihannya, mereka selama ini sering dianggap sebelah mata atau selalu mendapatkan perlakuan diskriminasi, organisasi berperan sebagai rumah mereka dalam bertukar pemikiran mengenai pemilu dan lain sebagainya. Pemilih mengharapkan para pemimpin yang dipilihnya kelak bisa mengayomi dan mengakomodir kepentingan disabilitas. Negara merupakan rumah bagi seluruh rakyatnya, termasuk bagi kaum disabilitas. Sudah seharusnya negara dapat menciptakan rasa aman, nyaman, damai, maupun jaminan terhadap keberlangsungan hidup setiap warganya. Peran negara masih sangat jauh dalam memahami kebutuhan apa saja yang perlu dipenuhi untuk para disabilitas.

Usia seorang kandidat tidak mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya melainkan dipengaruhi oleh kinerja kandidat, karena kinerja kandidat menjadi pertimbangan pemilih, semakin bagus kinerjanya maka di mata pemilih dia memiliki nilai plus tersendiri. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pemilih sudah mulai memasuki atau berada pada pemilih cerdas karena telah mempertimbangkan segala kemungkinan. Gradasi nilai tentang keterpilihan seseorang berdasarkan umur bukan lagi menjadi faktor pendukung karena kini masyarakat sudah mengalami perubahan pola pikir menjadi lebih maju.

Dalam memberikan pilihan politik mereka memiliki preferensi tidak saja dari track record dan juga kemampuan kandidat, tetapi juga dari aspek sosiologis yaitu dipengaruhi oleh agama. Sebagaimana diketahui sebagian besar negara Indonesia beragama Islam dan juga menjadi populasi Islam terbesar di dunia. Dapat disimpulkan bahwa agama mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya, karena pemilih berharap seorang pemimpin tetap mempergunakan ajaran atau nilai-nilai agama dalam menjalankan pemerintahan.

b. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia secara ilmiah. Salah satu konsep psikologis sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku pemilih dalam suatu pemilihan umum adalah berupa identifikasi partai. Menurut pendekatan psikologis, tingkah laku akan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan eksternal individu dalam masyarakat. Pendekatan psikologis sosial juga bisa

menjelaskan bagaimana sikap dan harapan masyarakat dapat melahirkan tindakan serta tingkah laku yang berpegangan teguh pada tuntutan sosial.

Ada beberapa aspek pemilih menjatuhkan pilihannya dari pendekatan psikologis, yaitu ketertarikan seseorang dengan partai-partai politik, orientasi seseorang terhadap isu-isu, orientasi seseorang terhadap isu kandidat. Identifikasi partai digunakan untuk mengukur sejumlah faktor pribadi maupun politik. Seperti pengalaman pribadi atau orientasi politik yang relevan bagi individu. Pengalaman pribadi dan orientasi politik sering dipengaruhi oleh situasi dan kondisi lingkungan. Sementara evaluasi terhadap kandidat dilihat karena sejarah yang telah diukir atau masa lalu kandidat.

Pada saat pilpres berlangsung identifikasi partai memberikan pengaruh terhadap penyandang disabilitas dalam menentukan pilihan politiknya. Terlebih lagi penyandang disabilitas tersebut merupakan seorang simpatisan partai tertentu.

Pada pilpres tahun 2019 terlihat bahwa isu-isu politik banyak bermunculan, namun yang sangat mencolok pada waktu itu adalah isu tenaga kerja asing yang berkembang di Indonesia. Isu tenaga kerja asing mempengaruhi penyandang disabilitas dalam menentukan pilihannya.

Partai idola bukan penentu pemilih menentukan pilihannya melainkan faktor kepribadian kandidat yang menjadi pertimbangan utama pemilih ketika memilih pasangan calon. Seseorang dianggap berintegritas ketika ia memiliki kepribadian dan karakter sebagai berikut: jujur, dan dipercaya, memiliki komitmen, bertanggung jawab, menepati janji,

setia, menghargai waktu, memiliki prinsip dan nilai-nilai hidup. Dengan kata lain keteguhan sikap dalam mempertahankan prinsip yang menjadi landasan hidup dan melekat pada diri seseorang sebagai nilai-nilai moral. Ketegasan dan bijaksana seorang kandidat mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan. Karena bagi pemilih seorang yang bijaksana dan tegas mampu mengambil keputusan dengan tepat serta disegani oleh banyak orang karena ketegasan yang dimilikinya.

c. Pendekatan Pilihan Rasional

Ramlan Surbakti berpendapat bahwa pemilih rasional yang diadaptasi dari ilmu ekonomi ini biasanya menggunakan perhitungan untung rugi dalam menentukan pilihan politiknya. Perilaku pemilih berdasarkan pertimbangan rasional tidak hanya berupa pemilih alternatif yang paling menguntungkan atau yang mendatangkan kerugian yang paling sedikit, tetapi juga dalam arti pemilih alternatif yang menimbulkan resiko yang paling kecil.

Pendekatan pilihan rasional memandang bahwa pemilih dalam menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan untung rugi jika calon yang dipilihnya memberikan manfaat secara menyeluruh. Dalam ilmu ekonomi, rasional ialah suatu hal yang menguntungkan, namun dalam preespektif politik ialah suatu yang dapat memenuhi dan memperjuangkan aspirasi politiknya. Karena itu jika tidak ada calon kandidat yang tidak bisa menawarkan dan merasionalkan programnya pada sebuah pilihan, terutama didepan para pemilih-pemilih yang rasional maka kandidat tersebut akan sulit untuk menang. Untuk menjelaskan hal sebelumnya maka akan dikaji melalui pertimbangan-pertimbangan kalkulasi

untung rugi dan kemampuan memilih untuk menelaah segala program yang diajukan oleh calon kandidat.

Visi-misi atau program-program yang diberikan tersebut tidak hanya untuk masyarakat umum tetapi bagi bagi penyandang disabilitas juga, ketika calon yang dipilih menang diharapkan bisa memberikan perhatian lebih kepada penyandang disabilitas yang selama ini selalu dipandang sebelah mata. Maka dari itu visi-misi atau program-program yang ditawarkan oleh kandidat berpengaruh dengan keputusan memilih dalam menentukan pilihannya.

Adanya pemberian barang-barang pada saat kampanye namun itu tidak mempengaruhi memilih dalam menentukan pilihannya, karena memilih memiliki kepekaan rasionalitas terhadap pilihannya. Kepekaan memilih terhadap informasi politik melalui komunikasi yang didapatkan oleh memilih, baik itu sumber elektronik maupun sumber lingkungan sekitar. Informasi yang didapatkan oleh memilih membuat memilih mengevaluasi informasi tersebut, hasil evaluasi tersebut lah yang memunculkan sikap rasionalitas.

Kekayaan seseorang kandidat mempengaruhi memilih tersebut dalam menentukan pilihannya sehingga bisa terhidar dari tindakan korupsi. Karena bagi memilih orang yang kaya raya ketika dia memimpin tujuannya tidak menumpukkan harta, akan tetapi pemimpin tersebut akan fokus pada kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin.

Terutama kaya raya secara spiritual tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok serta golongan orang kaya. Selain itu pemimpin harus memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan

emosional dan kecerdasan spiritual hingga menjadikan dirinya memiliki kecerdasan paripurna diantara orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang kita harapkan adalah pemimpin yang pikiran, waktu, tenaga, dan hartanya dikerahkan untuk masyarakat banyak.

Penyandang disabilitas dipengaruhi oleh prestasi kandidat dalam menentukan pilihannya. Dengan demikian pemimpin tersebut telah terbukti memiliki pengalaman memimpin bangsa ini, telah memberikan bukti dengan berbagai keberhasilan.

Pemilih dipengaruhi oleh prestasi kandidat dalam menentukan pilihannya. Dengan demikian pemimpin tersebut telah terbukti memiliki pengalaman memimpin bangsa ini, telah memberikan bukti dengan berbagai keberhasilan.

3. Kecenderungan Perilaku Memilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Presiden tahun 2019

Pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan mengenai tiga pendekatan terhadap memilih menentukan pilihannya yang digunakan pada penelitian ini. Dari semua informan penelitian terdapat 5 orang penyandang yang menggunakan hak pilihnya. Dari tiga pendekatan yang paling sering digunakan memilih pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Dimana memilih dipengaruhi oleh organisasi penyandang disabilitas.

Para penyandang disabilitas memiliki kesadaran yang tinggi dalam menggunakan hak pilih yang dipengaruhi oleh organisasi penyandang disabilitas. Terlihat bahwa mereka memiliki tujuan yang sama yaitu ingin mendapatkan pemimpin yang bisa mengayomi mereka dan memiliki program khusus untuk mereka.

4. Perilaku Memilih Yang Tidak Memilih

Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019. Ada beberapa faktor yang membuat pemilihan tidak memilih:

1. Faktor Internal

Pemilih tidak menggunakan hak pilih salah satunya karena adanya faktor teknis, dimana saat pemilihan, pemilih tersebut sedang tidak sehat atau memang memiliki pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.

2. Faktor Eksternal

Pemilih tidak menggunakan hak pilih karena adanya faktor administratif. Hal ini terjadi karena tidak terdata sebagai pemilih, tidak memiliki KTP/hilang.

Berdasarkan kedua faktor diatas peneliti memiliki dua informan yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Pertama, pemilih memiliki keinginan untuk memilih, namun karena faktor administratif yaitu adanya salah pendataan dan kurangnya surat suara menyebabkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Kedua, memiliki niat untuk memilih namun tidak kebagian suara dan juga tidak tersedianya kertas braile khusus untuk tuna netra.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan pada orientasi kognitif pemilih sudah memahami pentingnya pemilu, mengetahui waktu pelaksanaan pemilu, memahami asas-asas pemilu, dan mengenal kandidat serta partai yang ikut berpartisipasi. Orientasi afektif yaitu menganggap bahwa pemilu sangat penting bagi keberlangsungan negara. Pemilih cenderung mengatakan bahwa kinerja

penyelenggara pemilu pada saat itu kurang efektif yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak suaranya. Orientasi evaluatif yaitu pemilih menilai pelaksanaan pemilihan presiden tahun 2019 tidak berjalan dengan lancar, masih banyak terjadinya kecurangan. Pemilih juga beranggapan bahwa seorang kandidat layak dipilih karena rekam jejaknya yang baik dan prestasi yang telah dicapai oleh kandidat.

Sedangkan perilaku memilih pada pendekatan sosiologis dipengaruhi oleh organisasi penyandang disabilitas, agama, kinerja kandidat. Pendekatan psikologis yaitu identifikasi kepartaian mempengaruhi perilaku pemilih dalam menentukan pilihan, isu tenaga kerja asing mempengaruhi seorang pemilih dalam menentukan pilihannya, figur kandidat yang memiliki kharismatik dan kepribadian kandidat. Pendekatan pilihan rasional pemilih dipengaruhi oleh visi-misi dan prestasi yang dicapai oleh kandidat, kekayaan seseorang, kepekaan rasionalitas dan isu utang.

Kecenderungan perilaku memilih lebih dipengaruhi oleh organisasi disabilitas. Sedangkan pemilih yang tidak menggunakan hak pilih pada umumnya karena tidak kebagian surat suara.

2. Saran

Adapun saran-saran yang perlu disampaikan pada hasil penelitian ini adalah:

1. Fungsi partai politik sebagai wadah pembelajaran politik masyarakat belum berjalan dengan baik. Untuk kedepannya partai politik harus memberikan pendidikan politik dan mensosialisasikan pemilu pada penyandang disabilitas karena mereka juga memiliki hak untuk memilih.
2. Bagi pemerintah diharapkan membuat peraturan khusus mengenai teknis pemenuhan hak politik bagi penyandang

- disabilitas dalam pemilihan umum, sehingga teknis-teknis pemenuhan hak disabilitas dalam pemilihan umum pada setiap tingkatnya memiliki pedoman yang mudah untuk dipahami dan memuat setiap tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing komponen penyelenggara pemilihan umum dalam pelaksanaan pemenuhan hak tersebut. Mengembangkan inovasi-inovasi demi terselenggaranya pemilu yang aksesibel dan non-diskriminatif terhadap penyandang disabilitas maupun kelompok rentan lainnya.
3. Membentuk tim khusus penyelenggaraan pemilu yang mensosialisasi, memberi materi politik, menjelaskan cara memilih, membagikan undangan langsung ketujuan penyandang disabilitas, dan yang paling penting membimbing penyandang disabilitas sampai surat suara para penyandang disabilitas terhitung dan sejajar dengan hitungan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Bacaan :

Buku

- Arikunto. 2006. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. PT. Rineka.
- Budiardjo, miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Kuskridho Ambardi. R. William Liddle. Saiful Mujani. 2012. *Kuasa Rakyat*. Jakarta Selatan: Mizan Publika.
- Maksudi, Iriawan, Beddy. Drs. 2017. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moris Adidi Yogia. Wuwung Ahmadi. 2017. *Orientasi Politik Pemilih (Studi Pemilihan Anggota Legislatif Riau Dapil Riau II)*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing.
- Nasution. 2009. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sastroatmojo, Sudijono. 1995. *Partisipasi Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Sidney Verba, Gabriel Almond diterjemahkan Sahat Simamora. 1984. *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Bandung: Bina Aksara.
- Sitepu, P.Anthonius . 2012. *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Jurnal

- Al Rafni, Ronnie Farzianto. 2020. *Orientasi Politik Santri Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi di Pondok Pesantren Darul Ulum Kelurahan Aia Pacah Kota Padang)*. Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang.

Amalia, Ilma Nur. 2015. *Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pesisir Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014 (Studi Masyarakat Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang)*. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Endang Wariski, "Hubungan Antara kecacatan Fisik Anak dan Depresi Ibu dari Anak-Anak Tuna Daksa di YPAC Surabaya", Jurnal Anima Vol.VIII No.32, Januari 2003, hlm 3.Universitas Surabaya.

Lestari, Dina. 2018. *Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2017*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau.

Mopeng, Dwidyawati, Esther. 2015. *Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Minahasa Utara Periode 2016-2021 (Studi Di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi)*. Jurusan Ilmu pemerintahan FISIP Universitas Sam Ratulangi.

Reski Razak, Muhammad. 2018. *Partisipasi dan Jaminan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Yayasan Yukartuni Makassar pada Pemilu Legislatif 2014*. Jurnal Politik Profetik Volume 6, No 1 Tahun 2018. Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar

Suri Puti, Nilam. 2017. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Di Kecamatan Ukui Tahun 2015*.Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau.

Wira Kurniawan, Muhammad. 2017. *Orientasi Politik dan Bentuk*

Keterlibatan Paguyuban Mahasiswa Bengkalis di Pekanbaru pada Pilkada Bengkalis Tahun 2015. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau.

Skripsi

Purboyo, Edie. 2014. *Analisis Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Walikota makasar 2013 (Studi Keterpilihnya Dannypamonto-Syamsu rizal)*. Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar.

Sumber lain

Data Dokumen KPU Kota Pekanbaru Tahun 2019.